

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN
TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG JAMINAN KESEHATAN**

(Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

INDAH WULAN ANGGINI

NIM: 11727202110

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H / 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK).”** yang di tulis oleh:

Nama : INDAH WULAN ANGGINI
 NIM : 11727202110
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan di setuju untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru , 27 Juli 2021

Dosen Pembimbing ,

JONI ALIZON, S.H., M.H.
NIK. 13021704 1

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)"* yang ditulis oleh :

Nama : **INDAH WULAN ANGGINI**

NIM : 11727202110

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari : Senin, 20 September 2021

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Asril, SHL., MH.

Sekretaris

Musrifah, SH., MH.

Penguji I

DR. H. Abu Samah, MH

Penguji II

Firdaus, SH., MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)”. Sejak berlakunya pada tahun 2014, BPJS kesehatan mengalami berbagai permasalahan dan kendala, Salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Kampung Sialang Sakti, serta apa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kampung Sialang Sakti.

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan terhadap peningkatan pelayanan di Kampung Sialang Sakti belum berjalan secara baik. Faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kampung Sialang Sakti adalah kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan , kurangnya kesadaran pserta dalam membayar iuran dan kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Bapak Poniman dan Ibu Ngatiyem, Kakak dan Abang Tersayang Sutriani dan Purwanto, serta Adik Dananjaya Adiwangsa, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa, restu, dan cintanya.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Asril, SHI., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, M.A. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

8. Ibu Nilam Farticia Purba selaku Kepala Kantor BPJS Kesehatan Siak beserta Staff staff nya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum D dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memotivasi, berbagi ilmu, wawasan selama kuliah, dan telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Imelda Maisyaroh dan Nihaya Almutimah yang menemani, membantu, memotivasi dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
11. Kepada Hepy Sriwahyuni, Lucy Anggraini, Cici Rianci, Cheny Clever Coarcol dan teman-teman yang tidak tertuliskan satu persatu yang telah membantu dan memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

INDAH WULAN ANGGINI
NIM. 11727202110

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau, UIN Sultan Syarif Kasim

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II	18
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Siak	18
1. Visi dan Misi BPJS Kesehatan	18
2. Kondisi Umum Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Siak	18
3. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Siak	19
B. Kampung Sialang Sakti	19
1. Gambaran Umum Kampung Sialang Sakti	19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Organisasi Pemerintahan Kampung Sialang Sakti.....	20
BAB III	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan	27
1. Pengertian Kebijakan	27
2. Efektivitas Kebijakan.....	27
B. Jaminan Kesehatan Nasional	33
1. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional	33
2. Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional	34
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	36
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	36
2. Dasar dan Prinsip BPJS Kesehatan.....	36
3. Kepesertaan BPJS Kesehatan	38
D. Pelayanan Publik	40
1. Definisi Pelayanan Publik	40
2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik	42
3. Asas-Asas Pelayanan Publik	44
4. Prinsip Pelayanan Publik.....	46
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Efektivitas Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun kabupaten Siak	50
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	58
1. Kurang Maksimalnya Pelayanan yang Diberikan Oleh Fasilitas Kesehatan Terhadap Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan	59
2. Kurangnya Keadilan Pelayanan Atau Sikap Diskriminasi Terhadap Pasien Pengguna Layanan BPJS Kesehatan	60
3. Kurangnya Kesadaran Untuk Membayar Iuran BPJS Kesehatan	61
4. Kurangnya Sosialisasi dari Pihak BPJS Kesehatan Kepada Masyarakat	63
BAB V	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sample	15
Tabel II. 1 Prasarana Pendidikan	21
Tabel II. 2 Prasarana Peribadatan	22
Tabel II. 3 Prasarana Kesehatan	23
Tabel II. 4 Prasarana Olahraga	24
Tabel II. 5 Prasarana Mata Pencaharian Masyarakat	24
Tabel IV. 1 Tanggapan Responden Apakah Mengetahui Alasan Kenaikan Iuran.	50
Tabel IV. 2 Tanggapan Responden Apakah Kenaikan Iuran Seimbang Dengan Peningkatan Pelayanan	51
Tabel IV. 3 Tanggapan Responden Apakah Kenaikan Iuran Memberatkan Peserta	54
Tabel IV. 4 Tanggapan Responden Apakah Menaikkan Iuran Bukan Langkah Tepat	55
Tabel IV. 5 Tanggapan Responden Apakah Merasakan Kurang Maksimalnya Pelayanan yang Diberikan Oleh Fasilitas Kesehatan	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 6 Tanggapan Peserta Apakah Merasakan Kurangnya Keadilan Pelayanan Atau Sikap Diskriminasi Sebagai Pasien Pengguna Layanan BPJS Kesehatan	60
Tabel IV. 7 Apakah Membayar Iuran Setiap Bulan Tanpa Menunggak	61
Tabel IV. 8 Tanggapan Responden Apakah Pernah Ada Sosialisai Di Kampung Sialang Sakti	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Siak	18
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan dimana seseorang mampu bertindak dan berbuat baik secara jasmani maupun rohani. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.¹ Masyarakat sejahtera adalah terpenuhinya kesejahteraan lahir dan batin, serta sehat jasmani dan rohani.

Kesehatan merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan pembangunan, pembangunan dalam bidang sosial sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang mendapat perhatian cukup memadai dari pemerintah sehingga dari waktu ke waktu pembangunan dalam bidang sosial ekonomi mengalami berbagai kemajuan yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, negara memiliki tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh konstitusi untuk menyediakan berbagai pelayanan hak-hak dasar kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan termasuk dalam bidang kesehatan.² Salah satunya adalah penyelenggaraan

¹ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

² Endang Wahyati Yustina dan yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan primer yang bisa didapatkan di setiap tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, pasal 28H ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya di dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.³

Jaminan sosial adalah perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sedangkan jaminan kesehatan sendiri merupakan jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta mempunyai manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁴

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ (Frequently Ask Question) BPJS Kesehatan*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah melalui Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 membentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. BPJS kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini melayani berbagai lapisan dari kalangan masyarakat. BPJS kesehatan ditujukan untuk memberikan proteksi agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara merata.⁵

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Pengguna atau peserta BPJS Kesehatan dikategorikan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu jasa yang diperoleh oleh pengguna BPJS kesehatan ialah berbagai bentuk jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga

⁵ Monica Pertiwi dan Herbasuki Nurcahyanto, *Evektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang*, (Semarang: 2016), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berupa tenaga medis (dokter), pihak rumah sakit dan penyedia obat-obatan.⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.⁷ Fungsi tarif atau iuran adalah untuk membiayai peserta beserta keluarganya apabila suatu saat terjadi resiko sosial ekonomi. Tarif atau iuran BPJS kesehatan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan program, cukup atau tidaknya tarif sangat menentukan keberlangsungan program di masa mendatang.

Sejak berlakunya pada tahun 2014, BPJS kesehatan mengalami berbagai permasalahan dan kendala. Pemerintah dianggap setengah hati dalam melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

⁶ Hanum Rahmaniar Helmi, Tesis : “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*” (Surabaya : UNAIR, 2015), hlm. 3.

⁷ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenaikan iuran BPJS kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang mulai diberlakukan terhitung sejak 1 Juli 2020 adalah sebagai berikut⁸ :

1. Iuran kelas I sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.
2. Iuran kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.
3. Iuran kelas III tahun 2020 sebesar Rp. 25.000 (Rp. 42.000 dikurang subsidi pemerintah sebesar Rp. 16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp. 35.000.

Layaknya kebijakan pada umumnya, dalam mengimplementasikan kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan juga menimbulkan masalah. Kenaikan iuran BPJS kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kesehatan pada bagian a dijelaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat atau kenaikan iuran ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan. Artinya harus ada kesinambungan besaran iuran yang dibayarkan

⁸ Kementrian Keuangan, "Perpres 64/2020: Upaya Pemerintah Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan Nasional" diakses dari <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perpres-64-2020-upaya-pemerintah-perbaiki-sistem-jaminan-kesehatan-nasional>, pada tanggal 5 November 2020, pukul 16.47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peserta dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Hartono selaku salah satu peserta mandiri BPJS Kesehatan mengatakan bahwa walaupun iuran telah dinaikkan dengan nominal yang tidak sedikit, pelayanan yang diberikan tetaplah sama, tidak ada perbedaan pelayanan sebelum dan sesudah iuran dinaikkan. Terlebih iuran dinaikkan saat kondisi ekonomi masyarakat sedang melemah sehingga peserta merasa keberatan untuk membayar iuran. Tingginya kenakikan iuran dan tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan. Karena program BPJS kesehatan ini sejatinya diciptakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang, terlebih dalam kondisi negara yang sedang dilanda Covid-19 seperti sekarang ini.

Adanya tuntutan dari masyarakat mengenai kebutuhan atas peningkatan pelayanan kesehatan menjadi faktor utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Namun pada kenyataannya peningkatan tarif iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Padahal dari satu implementasi kebijakan publik dapat diukur melalui pencapaian hasil atau *outcomes*, tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang hendak diraih, dapat diartikan bahwa keberhasilan dalam pencapaian atau tidak suatu kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang telah tercapai. Hal ini didukung oleh dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan atas perubahan yang telah terjadi.

Jika ditarik lagi akar masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dengan melihat alasan dinaikkannya tarif iuran adalah dikarenakan adanya defisit Anggaran, yang mana pemasukan lebih sedikit dari pengeluaran, atau yang biasa kita sebut dengan ketekoran. Salah satu alasan ketekoran tersebut adalah banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran. Di Kampung Sialang sakti sendiri menunggak membayar iuran sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi. Menurut Puji Rahayu selaku peserta mandiri BPJS Kesehatan yang tinggal di Kampung Sialang Sakti menyatakan bahwa dirinya selalu menunggak membayar iuran, kadang menunggak sampai 3 bulan. Menyikapi fenomena tersebut pemerintah menekankan sanksi atas tunggakan yang dituangkan dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, dalam pasal tersebut secara tidak langsung menginformasikan bahwa tujuan dibuatnya Peraturan mengenai kenaikan tarif iuran ini adalah untuk mendisiplinkan peserta dalam membayar dengan sanksi sedemikian rupa yang diharapkan kepada peserta untuk kemudian patuh dalam membayar iuran. Namun dalam kenyataannya kenaikan iuran dan ancaman sanksi tidak lantas membuat peserta patuh membayar iuran, justru terkesan memberatkan peserta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian secara mendalam dan membahas mengenai masalah ini dengan judul penelitian **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak).**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini dengan fokus pembahasan kepada efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan terhadap peningkatan pelayanan setelah diterapkannya kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri kelas I, II dan kelas III.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?
2. Apa faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi uraian yang menjawab perumusan masalah diatas. Disamping itu, pada bagian ini penulis juga dapat menguraikan tujuannya untuk menerangkan, membuktikan atau mengaplikasikan suatu gejala, konsep, dugaan atau membuat suatu *prototype*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan kenaikan iura BPJS kesehatan.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor penghambat pelaksanaan kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat Secara Akademis

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Bagi pengemban ilmu, diharapkan mampu menghasilkan karya tulis baru yang mendukung dalam pelaksanaan.

F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁹

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode penelitian mengacu pada prosedur tertentu untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

⁹ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cetakan 2, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.¹⁰ Jenis penelitian ini juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hukum dan bagaimana pelaksanaan hukum tersebut.

Sifat dalam penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara langsung di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian berada. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) kota Siak dan di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi ini untuk dilakukan penelitian adalah karena di Kampung Sialang Sakti ada masalah mengenai efektivitas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menarik untuk penulis teliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan/karyawan maupun staff kantor BPJS Kesehatan Kota Siak serta masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang merupakan pengguna layanan BPJS Kesehatan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sedangkan objek penelitian ini adalah efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat di analisis dan relevan dengan problem tertentu.¹¹ Sedangkan sumber data, menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya. Baik diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara, angket maupun berupa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

¹¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi serta peraturan perundang-undangan.

5. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga dapat berupa wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹² Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan data dengan mengambil sebagian atau beberapa sample dari populasi yang menetapkan persyaratan oleh penulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Tabel populasi dan sample

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kantor BPJS Kesehatan Siak	1	1	100%
2	Staff Pelayanan Kepesertaan Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Siak	2	1	50%
3	Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Kampung Sialang Sakti	605	60	10%
	Jumlah	608	63	100%

Dari tabel diatas, penulis membagi sample ke dalam 2 metode pengumpulan data dengan rincian total keseluruhan sample 60 orang, 50 menggunakan angket dan 10 orang wawancara langsung dengan penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, merupakan salah satu penelitian yang merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.
- c. Angket, yaitu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.
- d. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Setiap data yang dikumpulkan perlu dilakukan analisis. Sifat dan jenis data tertentu menurut teknik analisis data tertentu pula. Pengolahan dan analisis data perlu dilakukan secara teliti, cermat, karena mampu mempengaruhi hasil penelitian, atau keputusan dan kesimpulan yang dibuat.¹³

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang tujuannya mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan variabel saat penelitian sedang dilakukan dan dilaporkan apa adanya tanpa dimanipulasi. Metode deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan

¹³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 31.

yang terjadi di masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Siak

1. Visi dan Misi BPJS Kesehatan

Visi : Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi

Misi : - Memberikan layanan kepada peserta dan masyarakat

- Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia
- Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.¹⁴

2. Kondisi Umum Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Siak

- Lokasi Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Siak
Jl. Raja Kecik, Kp. Rempak, Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773
- Sistem Hari Kerja
Dalam menjalankan tugasnya BPJS Kesehatan memberikan sistem lima hari kerja mulai senin sampai jumat, hari libur hari sabtu dan minggu. Dengan jam operasional Pukul 08.00-15.00 WIB.
- Karyawan

¹⁴ BPJS Kesehatan, "Visi dan Misi BPJS Kesehatan" di akses dari <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2>, pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 23.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

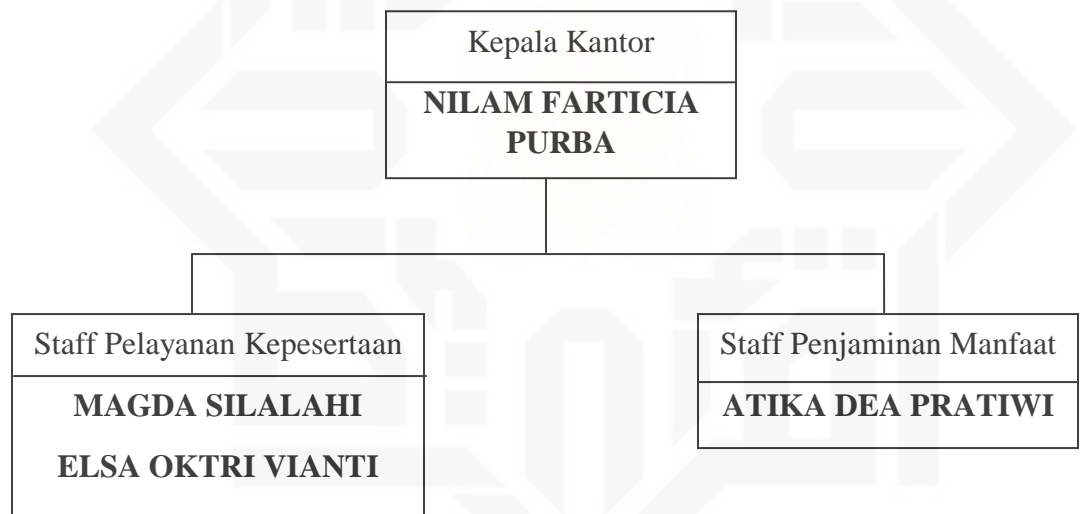
4 pegawai tetap dan 1 pegawai tidak tetap

3. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Siak

- Kepala Kantor BPJS Kesehatan
- Staff Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan
- Staff Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan

Gambar II.1

Struktur Organisasi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Siak



B. Kampung Sialang Sakti

1. Gambaran Umum Kampung Sialang Sakti

Kampung Sialang Sakti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dayun yang memiliki luas wilayah 19,15 Km² berada 50 meter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatas permukaan laut serta terdiri dari areal pemukiman, perkebunan, pemakaman, pemakaman dan prasarana umum. Kampung Sialang Sakti terdiri dari 3 (tiga) dusun, 20 (dua puluh) RK dan 6 (enam) RW Kampung Sialang Sakti secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Sengkemang
- Sebelah Selatan : Kampung Sawit Permai
- Sebelah Barat : Kampung Empang Pandan
- Sebelah Timur : Kampung Merangkai

Penduduk Kampung Sialang Sakti berjumlah 3.272 jiwa yang terdiri dari 1.589 perempuan dan 1.683 laki-laki. Jumlah kepala keluarga mencapai 864 dengan kepadatan penduduk 170 jiwa per Km².

2. Organisasi Pemerintahan Kampung Sialang Sakti

Pemerintahan Kampung Sialang Sakti dipimpin oleh seorang Penghulu Kampung dibantu dengan beberapa perangkatnya, yaitu :

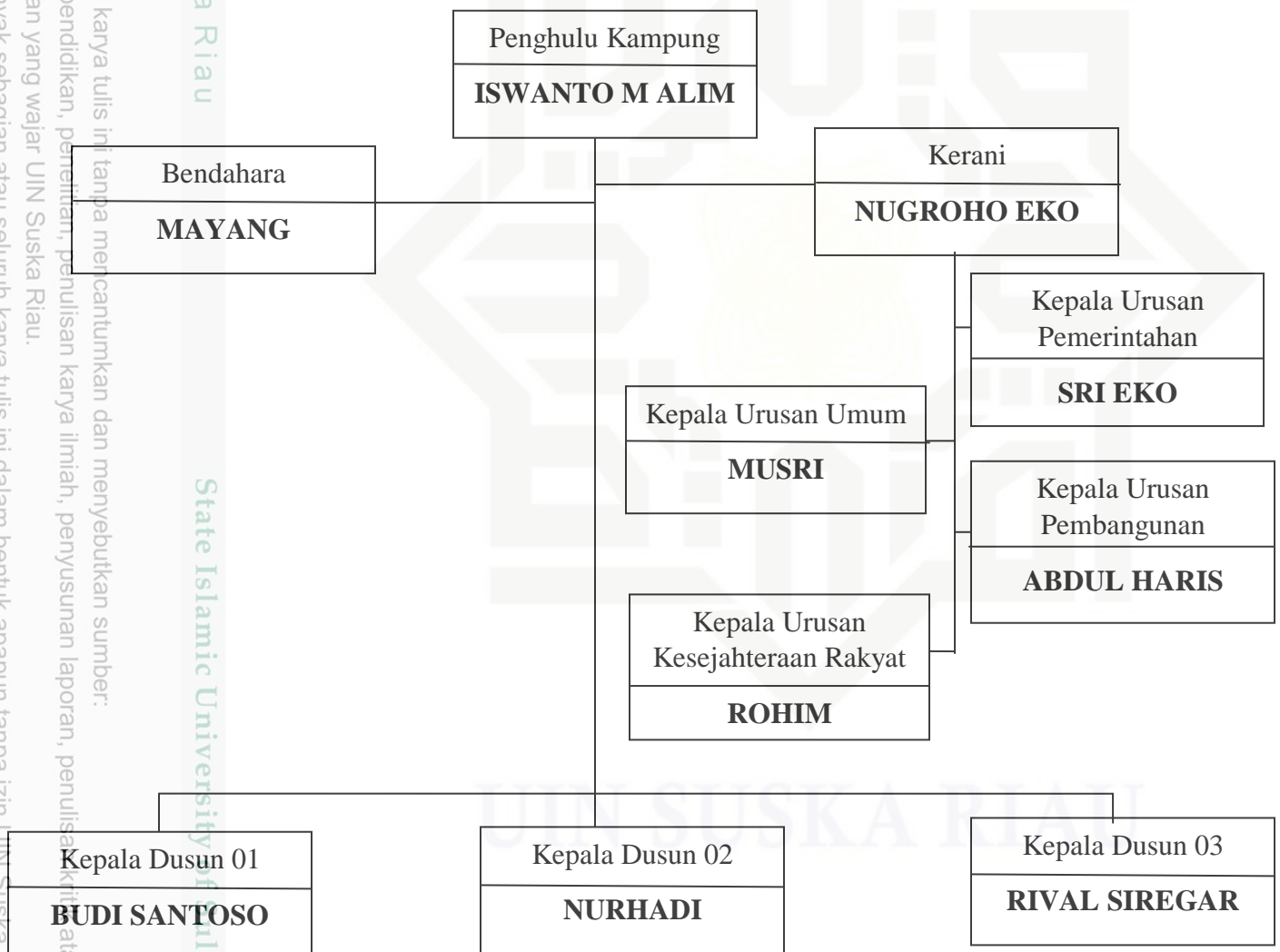
- 1) Penghulu Kampung
- 2) Kerani
- 3) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
- 4) Kepala Urusan Keuangan
- 5) Kepala Urusan Pembangunan

- 6) Juru Tulis
- 7) Bendahara
- 8) Kepala Dusun

Gambar II.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Sialang Sakti

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sarana dan Prasarana Umum Kampung Sialang Sakti

1) Prasarana dan Sarana Pendidikan

Kampung Sialang Sakti merupakan salah satu Kampung yang memiliki sarana pendidikan terbilang cukup banyak di Kecamatan Dayun diantara Kampung-kampung lain di Kecamatan Dayun. Adapun prasarana pendidikan di Kampung Sialang Sakti dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel II.1

Prasarana Pendidikan

NO	Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
3.	Sekolah Dasar (SD)	2
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
7.	Madrasah Aliyah (MA)	1

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2021*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas maka jelas bahwa di Kampung Sialang Sakti terdapat 2 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 unit Tanam Kanak-kanak (TK), 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 unit Sekolah Menengan Atas (SMA), dan satu unit Madrasah Aliyah (MA).

2) Prasarana dan Sarana Peribadatan

Prasarana peribadatan Kampung Sialang Sakti dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Prasarana Peribadatan

No	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	3
2.	Musholla	18
3.	Gereja	3

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel diatas , maka prasarana peribadatan di Kampung Sialang Sakti terdiri dari 3 Masjid, 18 Musholla dan 3 Gereja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Prasarana dan Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kampung. Sarana dan Prasarana kesehatan di Kampung Sialang Sakti dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.3

Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	1
2.	Polindes	1
3.	Posyandu	3
4.	Bidan	3
5.	Mantri	1
6.	Dokter	1

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2021*

4) Sarana dan Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga yang terdapat di Kampung Sialang Sakti dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4

Prasarana Olahraga

No	Prasarana Olahraga	Jumlah (Unit)
1.	Lapangan Sepak Bola	1
2.	Lapangan Volly	1
3.	Gor Bulutangkis	1

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2021*

2. Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Sialang Sakti

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kampung Sialang Sakti memiliki berbagai mata pencaharian yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.5

Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.131
2.	Wiraswasta	31
3.	Swasta	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Pedagang	31
5.	PNS	74
6.	TNI/POLRI	7
7.	Guru	71

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas masyarakat Kampung Sialang Sakti mayoritas berprofesi sebagai petani, dalam hal ini adalah petani kelapa sawit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku, memiliki ciri-ciri yang konsisten dan berulang, baik bagi pembuat maupun bagi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Edi Suharto kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, kebijakan tersebut berupa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan publik karna dibuat dan ditujukan untuk kepentingan publik.

2. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas suatu kebijakan merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian

¹⁵ Uddin, B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan. Efektivitas kebijakan dapat diketahui dengan membandingkan tujuan kebijakan dengan *output* kebijakan tersebut.

Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) Ketepatan sasaran, sejauhmana tepat antara kebijakan dengan dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi, sosialisasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan agar tersampaikan kebijakan tersebut dapat di pahami oleh masyarakat khususnya sasaran dari kebijakan tersebut.
- 3) Tujuan, sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan suatu kebijakan.
- 4) Pemantauan, kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya suatu kebijakan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila *output* tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas bahwa *output* tidak dapat dimanfaatkan. Atau jika syarat yang telah ditetapkan dalam kebijakan tidak dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak dapat menerima *output*.

3. Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta , pemberi kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan. Tarif iuran BPJS Kesehatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah berkali kali dinaikkan, terakhir kali dinaikkan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 2018 Tentang Jaminan kesehatan. Rincian mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dijelaskan sebagai berikut :

Besaran iuran BPJS Kesehatan sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Iuran kelas I sebesar Rp. 80.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.
2. Iuran kelas II yaitu sebesar Rp. 51.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.
3. Iuran kelas II yaitu sebesar Rp. 25.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kemudian diberlakukan sejak 1 Juli 2020 yang dijelaskan dalam Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam Pasal 34 Ayat 1-4 yang pada intinya menjelaskan kenaikan iuran peserta sebagai berikut :

1. Iuran kelas I sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.
2. Iuran kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Iuran kelas III tahun 2020 sebesar Rp. 25.000 (Rp. 42.000 dikurang subsidi pemerintah sebesar Rp. 16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp. 35.000.

4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei 2020, diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 6 Mei 2020 di Jakarta. Latar belakang dibentuknya peraturan ini adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020. Landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210).¹⁶

Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Peninjauan dan Pengusulan Besaran Iuran

- 1) Besaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
 - Iuran kelas I sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.

¹⁶<https://www.jogloabang.com/kesehatan/perpres-64-2020-perubahan-kedua-perpres-82-2018-jaminan-kesehatan>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 00.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iuran kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.
- Iuran kelas III tahun 2020 sebesar Rp. 25.000 (Rp. 42.000 dikurang subsidi pemerintah sebesar Rp. 16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp. 35.000.

2) Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Adapun iuran dibayar oleh Pemerintah.

3) Iuran PPU Pemerintah / Badan Usaha

Besaran iuran peserta PPU Pemerintah/Badan Usaha tidak mengalami perubahan. Adapun ketentuannya adalah batas paling tinggi gaji dan tunjangan Rp.12.000.000 dan batas paling bawah berdasarkan UMR Kabupaten/Kota.

4) Iuran Bayi Baru Lahir

Peraturan baru ini juga mengatur iuran bagi bayi baru lahir, yaitu dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

2. Penegakan Kepatuhan Membayar Iuran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika peserta dan/atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Supaya aktif kembali Peserta harus melunasi iuran tertunggak untuk paling banyak 24 bulan. Namun sebagai dukungan di masa Covid-19, untuk tahun 2020 penghentian sementara berakhir dengan pelunasan iuran paling banyak 6 bulan; dan kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif.

3. Penaikan Tata Kelola Sistem Layanan

Menteri Kesehatan bersama dengan K/L terkait, organisasi profesi dan asosiasi faskes akan melakukan peninjauan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Penerapan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan.

B. Jaminan Kesehatan Nasional

1. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.¹⁷

2. Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional

Ada beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu¹⁸ :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayang (1) dan (3).
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (2) dan (3).
 - (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
- 3) Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 Ayat (1)

¹⁷ <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=2>, diakses pada Tanggal 13 Juli 2021 Pukul 21.57.

¹⁸ Supriantoro, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 3-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Right* dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

4) Resolusi World Health Assembly ke-58

World Health Assembly ke-58 yang diselenggarakan oleh PBB di Geneva, 16-25 Mei 2005 menerbitkan resolusi WHA 58.33 yang mendesak pemerintah negara-negara anggota PBB untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan esensial bagi seluruh penduduk sekaligus melindungi penduduk terhadap risiko finansial keluarga akibat biaya pelayanan kesehatan. Rekomendasi ini memuat pendanaan kesehatan yang berkelanjutan, cakupan kesehatan semesta serta jaminan kesehatan sosial dan ketiga ide pokok tersebut kemudian dipopulerkan sebagai universal health coverage (UHC).

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- 9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.¹⁹

2. Dasar dan Prinsip BPJS Kesehatan

a) Dasar Hukum BPJS Kesehatan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁹ Solechan, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Administrasi dan pemerintahan Volume 2 No. 4, November 2019, hlm. 690.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b) Prinsip BPJS Kesehatan

1. Kegotongroyongan

Kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

2. Niralaba

Niralaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi seluruh peserta.

4. Kehati-hatian

Kehati-hatian adalah prinsip mengolah dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Portabilitas

Portabilitas adalah prinsip pemberian jaminan yang berkelanjutan meski peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana amanat

Dana amanat adalah iuran dan hasil pengembangan merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial (UU No. 24 Tahun 2011).

3. Kepesertaan BPJS Kesehatan

Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, peserta merupakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, yang terdiri dari :²⁰

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI)

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

²⁰ Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan peserta PBI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI / mandiri)

Peserta yang tidak menerima bantuan iuran merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang terdiri atas :

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas :

- a) Pegawai Negeri Sipil;
- b) Anggota TNI;
- c) Anggota Polri;
- d) Pejabat Negara;
- e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- f) Pegawai swasta;
- g) Pekerja yang tidak termasuk dalam poin a sampai huruf f yang menerima Upah.

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya

- a) Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
- b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya

- a) Investor;
- b) Pemberi kerja;
- c) Penerima pensiun;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Veteran;
- e) Perintis kemerdekaan; dan
- f) Bukan pekerja yang termasuk dalam poin a sampai e yang mampu membayar iuran.

D. Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Kata publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang bermakna umum, masyarakat dan Negara. Kata “*public*” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Publik merupakan sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Dengan demikian, pelayanan publik berarti setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu perkumpulan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pusat, daerah maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini berarti bahwa pelayanan publik berlaku dimana saja serta diberikan oleh instansi manapun, baik pemerintah maupun swasta. Fokus utama kebijakan publik di Negara modern adalah pelayanan publik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu segera sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.²¹ Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan sesuatu yang penting dan melekat pada diri manusia.

Menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah dipaparkan diatas, disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh

²¹ Zaenal Mukarom dan Muhibunbudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Government*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 33-34

²² Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi pemerintah atau badan publik lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik

Pelayanan publik terdiri dari berbagai bentuk, terjadi di setiap tingkatan pemerintah sesuai dengan bidang dan luas lingkungannya. Dibedakan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten kota bahkan sampai tingkat pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.²³ Selain itu, pelayanan publik juga diberikan sesuai dengan bidang masing-masing sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan publik kebanyakan mencakup bidang-bidang manajemen publik seperti : pemerintah pusat dan daerah, pendidikan, kewenangan kesehatan, pertahanan, peradilan/urusan, dalam negeri dan organisasi-organisasi semi Negara non komersil.²⁴

Berdasarkan Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, bentuk-bentuk pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3, yaitu :²⁵

1. Kelompok pelayanan Administratif

Kelompok pelayanan Administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

²³ Jusuf Madubun, *Disertasi Pelayanan Publik Di Kota Tual*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm. 63.

²⁴ Mukaron, *Op.Cit*, hal. 6-7.

²⁵ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok pelayanan barang

Kelompok pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan beberapa bentuk barang yang digunakan oleh publik.

3. Kelompok pelayanan jasa

Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Dalam proses pelaksanaan pemenuhan pelayanan publik terdapat beberapa komponen atau unsur pelayanan. Menurut Barata, terdapat 4 unsur penting dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan publik, yaitu :²⁶

1. Penyedia layanan

Penyedia layanan merupakan pihak yang memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).

2. Penerima layanan

Penerima layanan adalah mereka yang disebut sebagai konsumen (*consumer*) yang menerima atau menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan.

3. Jenis layanan

²⁶ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2004), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis layanan merupakan layanan yang disediakan atau diberikan oleh penyedia layanan kepada penerima layanan.

4. Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan dalam pelayanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan biasanya berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Untuk memberikan kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan public sebagai berikut :²⁷

1. Transparansi

Asas transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah untuk dimengerti.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Kondisional

²⁷ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Partisipatif yaitu mendorong serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak

Kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Pasal 4, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berdasar kepada asas :²⁸

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Keprofesionalan

²⁸ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 pasal 4 Tentang Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Ketepatan waktu
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

4. Prinsip Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik meliputi ;

1. Menetapkan standar pelayanan artinya standar tidak hanya menyangkut standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan.
2. Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan seluruh informasi yang dipergunakan dalam pelayanan. Penyelenggara pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang memungkinkan masyarakat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik ataupun saran, serta harus menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat pelanggan secara pro aktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil. Dalam pemberian barang layanan tertentu, dimana masyarakat pelanggan secara transparan diberikan pilihan, maka pengertian adil adalah proposional sesuai dengan yang dibayarkannya.
4. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan. Unit-unit pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-benar mudah diakses oleh pelanggan.
5. membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut menyimpang. Jika terjadi sesuatu yang menyimpang atau tidak pada tempatnya, dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan, maka setiap jajaran personil pelayanan dari setiap tingkatan mengetahui penyimpangan tersebut dan harus segera memperbaiki sesuai dengan kapasitasnya atau jika tidak dapat menyelesaikan masalah, maka wajib menyampaikan kepada atasannya mengenai penyimpangan tersebut.
6. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat atau pelanggan secara efisien dan efektif. Karena kriteria dasar pelayanan publik adalah efisiensi, efektivitas, serta ekonomis. Maka penggunaan sumber-sumber yang digunakan dalam pelayanan harus memenuhi kriteria ini.
7. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan harus secara kontinu melaksanakan pembaruan dan penyempurnaan baik secara responsive



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai masukan dari masyarakat/pelanggan dan penilaian kinerja pelayanan maupun secara proaktif atas kehendak manajemen.

Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
 - b. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan .
4. Akurasi; produk pelayanan publik dilakukan dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.²⁹

²⁹ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Op.Cit*, hlm. 21-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan kenikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Kampung Sialang Sakti belum efektif dilaksanakan. Karena tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan, peserta tidak mengetahui alasan dinaikkannya iuran, peserta merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran, menurut peserta menaikkan iuran bukanlah langkah yang tepat.
2. Faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kampung Sialang Sakti adalah :
 - a. Faktor kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.
 - b. Faktor kurangnya kesadaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
 - c. Faktor kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran agar pelaksanaan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di Kampung Sialang Sakti Kecamatan, yaitu :

1. Kepada masyarakat diharapkan lebih optimal dalam menjalankan Peraturan Presiden tersebut dengan cara membayar iuran tepat waktu agar regulasi tersebut berjalan secara efektif.
2. Kepada pihak BPJS Kesehatan hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan agar terjadi kesinambungan antara besaran iurn yang dipungut dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Agar seimbang antara hak dengan kewajiban peserta dalam melaksanakan program BPJS Kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barata, Atep Adya . *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2004.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2001.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku FAQ (Frequently Ask Question) BPJS Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2013.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibunbudin Wijaya Laksana. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Government*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Pradnyani, Ni Nyoman Ayu Ratih. *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sore Uddin B dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media. 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Supriantoro. *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. 2013.

Yustina, Endang Wahyati dan yohanes Budisarwo. *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 2020.

Jurnal

A, Noor Latifah Wafa Nabila dan Fini Fajrini. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Vol. 16 No. 2 (Juli 2020): h. 85.

Pertiwi, Monica dan Herbasuki Nurcahyanto. *Evektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang*. Semarang. 2016.

Solechan. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Administrasi dan pemerintahan Volume 2 No. 4 (November 2019): h.690.

Peraturan Perndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 pasal 4 Tentang Pelayanan Publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 KEP/M.PAN/7/2003
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan.

Sumber Internet

Helmi, Hanum Rahmaniar. 2015. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan [Tesis]. Surabaya (ID) :
Universitas Airlangga.

<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perpres-64-2020-upaya-pemerintah-perbaiki-sistem-jaminan-kesehatan-nasional>.

<http://bpjs-kesehatan.go.id>

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2>

<http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=2>

<https://ekbis.sindonews.com/read/287440/34/hati-hati-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-bisa-hambat-pemulihan-160950251>

<https://www.jogloabang.com/kesehatan/perpres-64-2020-perubahan-kedua-perpres-82-2018-jaminan-kesehatan>

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)"* yang ditulis oleh :

Nama : **INDAH WULAN ANGGINI**

NIM : 11727202110

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari : Senin, 20 September 2021

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Asril, SHI., MH.

Sekretaris

Musrifah, SH., MH.

Penguji I

DR. H. Abu Samah, MH.

Penguji II

Firdaus, SH., MH.

Mengetahui :

Kasubbag Akademik Mahasiswa dan Alumni

Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/6514/2020
Sifat : Biasa
Lamp. :
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 13 November 2020

Kepada
Yth.
Kepala Kantor BPJS Kabupaten Siak
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : INDAH WULAN ANGGINI
NIM : 11727202110
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2020
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : PELAKSAAN KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64BTahun 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Dekan

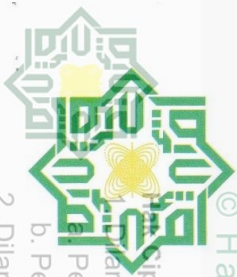
Dr. Wahidin, M.Ag
NIP.19710108 199703 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2356/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDAH WULAN ANGGINI
NIM : 11727202110
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kesehatan)
Kota Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SURAT KETERANGAN
NOMOR : /II.02/0721

Saya yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Indah Wulan Anggini
NIM : 11727202110
Tempat / Tanggal Lahir : Siak, 17 Juni 1999
Semester : VII (Delapan)
Jurusan / Fakultas : Ilmu Hukum/Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat : Kampung Sialang Sakti, RT 003 RW 005 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan memenuhi tugas akhir kuliah dengan judul " Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 " .

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 09 Juli 2021
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Siak

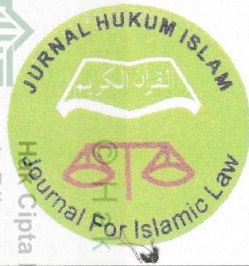

Nilam Patricia Purba

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : INDAH WULAN ANGGINI
NIM : 11727202110
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

Pembimbing: Joni Alizon, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDAH WULAN ANGGINI
NIM : 11727202110
Tempat/ Tanggal Lahir : SIAK, 17 JUNI 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



INDAH WULAN ANGGINI
NIM. 11727202110



RIWAYAT PENULIS

Indah Wulan Anggini, dilahirkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Juni 1999. Anak ke dua dari dua bersaudaraini merupakan putrid dari pasangan Poniman dan Ngatiyem, saat ini penulis tinggal di Jalan Bukit Barisan. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 17 Sialang Sakti Kabupaten Siak tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMP di SMPN 1 Dayun Kabupaten Siak tamat pada tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan di SMA Negeri 1 Dayun Kabupaten Siak dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun tahun 2019 penulis melakukan magang di Perwakilan Komisi Yudisial (PKY) Riau setelah itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pangkalan Makmur kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau. Pada tanggal 20 September 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “ Efektivitas Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.